

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Semakin majunya era globalisasi, persaingan dalam dunia bisnis menjadi semakin ketat. Tidak terkecuali di Indonesia, banyak perusahaan bersaing ketat untuk saling mendapatkan keuntungan. Persaingan bukan hanya dari satu sektor industri saja, melainkan terjadi di banyak sektor khususnya pada sektor *real estate* dan *property*, karena pemerintah Indonesia saat ini sedang marak-maraknya untuk membangun fasilitas di beberapa kota. Dalam kondisi demikian, setiap perusahaan dituntut untuk dapat beroperasi dengan tingkat efisiensi yang cukup tinggi agar mempunyai keunggulan dan daya saing. Jika perusahaan tersebut dapat bekerja dengan baik, maka pastinya akan menghasilkan keuntungan seoptimal mungkin dan akan mengundang banyak investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut.

Salah satu tujuan investor menanamkan modalnya ke suatu perusahaan adalah untuk mendapatkan *return* yang berupa dividen dan *capital gain*. Dividen merupakan sebagian atau seluruh laba perusahaan dalam menjalankan bisnis yang dibagikan kepada pemegang saham (Tandelilin, 2014: 32). Dalam pembagian dividen, perusahaan menentukan keputusan yang harus diambil melalui kebijakan dividen. Kebijakan dividen ini penting bagi suatu perusahaan dikarenakan kebijakan tersebut dapat berpengaruh terhadap sikap atau reaksi investor jika misalnya mereka tidak mendapatkan dividen atau adanya pemotongan dividen maka hal tersebut menjadi hal yang negatif karena mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Kebijakan dividen merupakan suatu keputusan yang sulit, karena pembagian dividen di satu sisi akan memenuhi harapan investor untuk mendapatkan *return* sebagai hasil dari investasinya, sedangkan dari sisi perusahaan dengan pembagian dividen akan mengurangi

sumber dana *intern* yang bisa digunakan untuk proyek perusahaan selanjutnya.

Kebijakan dividen sering menimbulkan konflik kepentingan antara pihak manajemen perusahaan dengan pihak pemegang saham. Pada prinsipnya pengelolaan perusahaan memiliki tujuan untuk kemakmuran para pemilik perusahaan. Pendelegasian wewenang pengelolaan perusahaan kepada para manajer berimplikasi terhadap adanya pemisahan tugas antara manajemen perusahaan dengan pemegang saham selaku pemilik perusahaan. Adanya pendelegasian tugas pengelolaan perusahaan mengakibatkan dikeluarkannya biaya tambahan oleh pemilik perusahaan untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak manajemen. Hubungan antara manajemen dengan pihak pemegang saham dijelaskan dalam *agency theory*. Pada *agency theory* menyatakan bahwa dalam pengelolaan perusahaan, timbul kemungkinan manajer cenderung lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada membuat keputusan untuk memaksimalkan kesejahteraan pihak pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976).

*Agency problem* akan terjadi antara pemegang saham mayoritas dan minoritas (La Porta et al., 2000). Pemegang saham mayoritas mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan strategis seperti, penunjukkan pemimpin perusahaan, penunjukkan anggota dewan direksi atau komisaris. Keputusan yang diambil oleh pemegang saham mayoritas cenderung akan mengeksploitasi kepentingan dari pihak pemegang saham minoritas. La Porta et al (2000) menyatakan eksploitasi yang dilakukan kepada pemegang saham minoritas meningkat di banyak negara. Ketika investor luar melakukan investasi ke dalam perusahaan, mereka menghadapi suatu risiko dan ketidakpastian apakah mereka akan memperoleh pengembalian kembali karena pemegang saham mayoritas atau manajer akan cenderung untuk mengeksploitasi mereka. Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan eksploitasi ini berkaitan dengan konflik keagenan yaitu mengambil keuntungan atas kekayaan perusahaan untuk kepentingan pribadinya sendiri.

Oleh sebab itu, penting diterapkannya mekanisme *corporate governance* untuk melindungi hak-hak pemegang saham minoritas.

Perbedaan hukum dan efektivitas pelaksanaan dalam perundang-undangan juga sangat berdampak pada perlindungan investor (La Porta et al., 2000). La Porta et al (2000) menyatakan pada negara yang menganut *common law countries* mereka membayar dividen lebih besar daripada negara yang menganut *civil law countries*. Negara yang menganut *common law countries* contohnya seperti Amerika dan Inggris, mereka memberikan perlindungan yang baik terhadap pemegang saham minoritas sedangkan negara yang menganut sistem *civil law countries* contohnya di negara-negara Asia, mereka memberikan perlindungan yang lemah terhadap pemegang saham minoritas. La Porta et al (2000) juga menyarankan ketika hak pemegang saham dilindungi dengan baik, maka mereka dapat menggunakan kekuatan tersebut untuk menekan para manajer perusahaan untuk membayar dividen lebih tinggi daripada menghabiskan kelebihan arus kas perusahaan untuk kepentingan pribadi mereka. La Porta et al (2000) menyebutkan bahwa pendekatan hukum dalam *corporate governance* memiliki peran yang penting dalam melindungi investor melalui sistem hukum (Legal) yaitu meliputi hukum dan pelaksanaannya. Hal tersebut dikarenakan investor luar khususnya pemegang saham minoritas dan kreditur lebih rentan terhadap perampasan.

Menurut La Porta et al (2000) *corporate governance* merupakan suatu mekanisme dimana investor luar dapat melindungi diri mereka dari perampasan atau pengeksploitasi oleh pemegang saham pengendali. Secara umum, *corporate governance* didefinisikan sebagai seperangkat mekanisme yang saling menyeimbangkan antara tindakan maupun pilihan manajer dengan kepentingan pemegang saham (Susanti, 2011). *Corporate governance* dapat menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan, baik dari pihak internal yang meliputi dewan komisaris, direksi, karyawan perusahaan, dan dari pihak eksternal yang meliputi kreditur, pemerintah, masyarakat dan *stakeholders* (Arifin, 2005). Di

Indonesia, penerapan *corporate governance* semakin meningkat pasca terjadinya krisis moneter pada tahun 1997-1998. Salah satu penyebab dari krisis tersebut adalah karena masih lemahnya *corporate governance* oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sehingga mengakibatkan banyak perusahaan dan perbankan yang bangkrut.

Keinginan perusahaan dalam upaya untuk meningkatkan *corporate governance* terbukti dari banyaknya perbaikan dan pengembangan standar-standar *corporate governance* baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Seiring meningkatnya kesadaran akan *corporate governance* di Indonesia, keberadaan lembaga yang khusus menangani pemeringkatan penerapan *corporate governance* pada perusahaan di Indonesia, yaitu *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG). IICG bertujuan menyajikan pedoman bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia tentang bagaimana menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) sehingga mereka bisa meningkatkan daya saing perusahaan Indonesia di dunia internasional (Sutojo dan Aldrige, 2008; Efendi, 2009). Dengan adanya penerapan *good corporate governance*, diharapkan manajer perusahaan akan mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan kepentingan pemegang saham, bukan untuk keuntungan diri sendiri. Selain itu, konsep *corporate governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan, terutama bagi pihak eksternal seperti kreditor, pemerintah, masyarakat dan *stakeholders*.

Penelitian yang dilakukan oleh Kowalewski, et al. (2007) menunjukkan bahwa *corporate governance* berpengaruh positif terhadap *dividend payout*. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori *outcome* yang menyatakan bahwa mekanisme *corporate governance* yang baik akan memberikan perlindungan yang baik kepada investor dan akan memberikan dividen yang tinggi terhadap pemegang saham. Penelitian yang dilakukan oleh O'Connor (2013) menunjukkan bahwa *corporate governance* berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap

kebijakan dividen. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Lian (2013) terhadap perusahaan manufaktur di BEI tahun 2004-2006 menunjukkan bahwa *corporate governance* berpengaruh secara negatif terhadap kebijakan dividen. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa struktur dan prosedur dewan komisaris serta praktik pengungkapan yang buruk berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Penelitian yang dilakukan oleh Reneboog & Szylagyi (2007) menunjukkan bahwa *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori *substitution* yang menyatakan bahwa perusahaan dengan praktik *corporate governance* yang lebih lemah akan memberikan dividen yang lebih tinggi. Dengan dilakukan tindakan tersebut, maka akan memberikan insentif bagi investor untuk terus berinvestasi ke dalam perusahaan mereka.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan, terdapat ketidak konsistenan hasil dari variabel-variabel tersebut. Oleh sebab itu, menarik untuk melakukan pengujian kembali mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap kebijakan dividen. Selain tentang *corporate governance*, penelitian ini juga akan meneliti 4 sub-kategori dari *corporate governance* yang nantinya akan dijadikan sebagai variabel independen dalam penelitian ini. 4 sub-kategori tersebut diambil dari *Globe & Mail Report on Business* yang merupakan sistem dari *governance rankings* sebagai studi tentang praktik *corporate governance* perusahaan yang terdiri dari: *board composition, shareholding & compensation, shareholder rights, dan disclosure policy*. Sistem pemeringkatan G&M telah banyak digunakan oleh peneliti lain untuk mengetahui hubungan *corporate governance* terhadap kebijakan dividen atau kinerja perusahaan, contohnya pada penelitian Mitton (2004), Brown dan Caylor (2004), Gompers et al. (2003), dan Jiraporn dan Ning (2006).

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Corporate Governance* berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen?
2. Apakah *Board Composition* berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen?
3. Apakah *Shareholding & Compensation* berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen?
4. Apakah *Shareholder Rights* berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen?
5. Apakah *Disclosure Policy* berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Governance* terhadap Kebijakan Dividen.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Board Composition* terhadap Kebijakan Dividen.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Shareholding & Compensation* terhadap Kebijakan Dividen.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Shareholder Rights* terhadap Kebijakan Dividen.
5. Untuk mengetahui pengaruh *Disclosure Policy* terhadap Kebijakan Dividen.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terkait pentingnya pengetahuan mengenai *Corporate Governance* yang baik, sehingga

meminimalkan konflik yang terjadi mengenai kebijakan dividen di suatu perusahaan.

#### 2. Bagi Penulis

Penulis diharapkan mampu menerapkan ilmu yang sudah diperoleh serta penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh *Corporate Governance* terhadap Kebijakan Dividen.

#### 3. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi investor dalam mempertimbangkan atau mengambil keputusan mengenai bisnis yang tepat di masa mendatang.

#### 4. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dan sebagai referensi yang dapat menambah pengetahuan bagi yang membacanya mengenai pengaruh *Corporate Governance* terhadap Kebijakan Dividen.

### **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

Dalam laporan penelitian ini, sistematika penulisan terdiri dari lima bab, disusun sebagai berikut:

#### **BAB 1. PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan model penelitian.

#### **BAB 3. METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang cara untuk melakukan kegiatan penelitian, antara lain: desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan

data, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data.

#### **BAB 4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi gambaran umum dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan yang nantinya akan memberikan jawaban atas permasalahan dari penelitian ini.

#### **BAB 5. SIMPULAN DAN SARAN**

Merupakan bab akhir tentang simpulan secara umum dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Dan berisi saran-saran yang dapat digunakan sebagai masukan dan dasar dalam penelitian selanjutnya.